



Dana TP-APBN Rp 10 Miliar Hanya 30 Persen Dimanfaatkan RSUD Bangli

Bangli (Bali Post) -

Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli gagal menggunakan secara keseluruhan dana tugas pembantuan (TP) APBN 2014 senilai Rp 10 miliar yang digelontor pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dari keseluruhan dana yang digelontorkan tersebut, pihak rumah sakit hanya bisa memanfaatkan sekitar 30 persen. Sementara sebagian besar sisanya terpaksa dikembalikan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Bangli drg. Wardani seizin Direktur RSUD Bangli dr. Wayan Sudiana, saat ditemui, Senin (18/5) mengakui hal tersebut. Dia menjelaskan sebenarnya pihaknya sangat ingin memanfaatkan dana TP APBN ini semaksimal mungkin untuk pengadaan sejumlah peralatan penunjang kesehatan. Hanya saja karena waktu yang dimiliki sangat mepet, pengadaan alat kesehatan tidak bisa dilakukan sepenuhnya.

Dimana dana yang dige-

lontor pemerintah pusat itu baru keluar pada 21 Oktober 2014 lalu, sehingga pihak rumah sakit hanya memiliki waktu sekitar 1,5 bulan memanfaatkannya. Hal lainnya yang juga menjadi penyebab gagalnya pihak rumah sakit memanfaatkan keseluruhan dana TP APBN tersebut karena sejumlah berkas yang sudah masuk di ULP tidak mendapatkan respons dari pihak distributor.

Dijelaskan Wardani, sedikitnya ada 11 item alat kesehatan (alkes) yang diadakan melalui *E-Purchasing* menggunakan dana tersebut. Tetapi yang berhasil direalisasikan hanya *operating table*, *ECG 12 led*, *USG 4 D*, *Infusion pump* dan *syrinse pump*. Sementara *incubator*, *suction pump* serta *infane* yang berkasnya sudah masuk dan diproses unit layanan pengadaan (ULP) gagal direalisasikan karena tidak mendapatkan respons dari distributor. "Padahal ketiga peralatan tersebut sangat

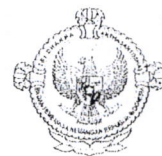
dibutuhkan dan harganya tinggi," ujarnya.

Dia menambahkan, sebenarnya oleh pihak distributor sejumlah peralatan itu dijanjikan bisa datang bulan Februari. Tetapi karena peraturan tidak memungkinkan, pihak rumah sakit tidak mau ambil risiko. Sehingga alat tersebut terpaksa gagal diadakan. "Anggaran 2014 penggunaannya berakhir 15 Desember 2014. Kalau kami paksakan alatnya datang Februari 2015, maka akan menyalahi aturan. Kami tidak berani seperti itu," tegas Wardani.

Atas kondisi itu, dirinya pun sangat menyayangkan kenapa dana itu justru turun akhir tahun. Ada kesan, pemerintah pusat setengah hati memberikan bantuan. Belum lagi proses pengadaan barang untuk disetujui sangat rumit. Sementara itu, untuk sisa dana yang tidak berhasil dimanfaatkan, pihak rumah sakit Bangli terpaksa mengembalikannya ke pemerintah pusat. (kmb40)

Edisi : Selasa, 19 Mei 2015

Hal : 10



Giri Prasta Tolak Reklamasi

Mangupura (Bali Post) -

Setelah lama tidak menyatakan sikap, Ketua DPRD Badung Nyoman Giri Prasta secara pribadi menegaskan turut menolak reklamasi Teluk Benoa dan mengusulkan normalisasi. Sikap itu, dikatakan politisi asal Plaga, Badung Utara ini saat bertemu kader PDI Perjuangan Kuta dalam konsolidasi PDI Perjuangan Badung, Minggu (17/5) malam.

Giri Prasta menyatakan sepakat dengan mayoritas warga Kuta untuk menolak rencana investor mereklamasi Teluk Benoa. "Jika DPRD Badung sebelumnya menyetujui reklamasi, pada masa kepemimpinan kami justru mengubah reklamasi menjadi normalisasi," tegasnya.

Menurutnya, normalisasi wajib dilakukan guna mengembalikan kawasan seperti semula. "Normalisasi mengembalikan kawasan seperti semula, sedangkan reklamasi membuat wilayah baru," ungkapnya.

Hal. 23

Pulau Pudut

Pulau Pudut

Dari Hal. 1

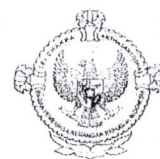
Normalisasi yang dilakukan, ujarnya, menangkal abrasi. Salah satunya mengembalikan luas Pulau Pudut yang saat ini wilayahnya menyusut drastis. Wilayah Pulau Pudut wajib hukumnya untuk dinormalisasi. "Normalisasi lainnya yang perlu dilakukan terhadap pohon-pohon bakau

yang gundul. Pohon bakau harus kembali ditanam di area-area yang telah gundul," ucapnya.

Satu lagi, normalisasi yang dilakukan terhadap pengangkatan sedimentasi yang menyebabkan dangkalnya perairan serta merusak biota laut. "Ini harus dilakukan. Prinsipnya saya siap menolak reklamasi," tegasnya. (kmb27)

Edisi : Selasa, 19 Mei 2015

Hal : 1 dan 23



Bali Post/kmb34

FONDASI - Pembangunan fondasi diakui I Nyoman Budi Arsana alias Komang Milik menjadi lahan pribadi, sehingga dijual kepada investor asal Denpasar Heri Mustika, untuk dibangun akomodasi pariwisata resort dan hotel, Minggu (18/5) lalu.

Edisi : Selasa, 19 Mei 2015
Hal : 13



Sambungan

Dua Hektar Reklamasi di Teluk Penerusan

Di Atas Tanah Pribadi

Singaraja (Bali Post) -

Rencana reklamasi di Teluk Penerusan, Banjar Dinas Banyuwedang Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak itu adalah tanah warisan almarhum I Made Mangku. Tanah yang merupakan lahan pribadi dua hektar itu kemudian dijual secara terbuka kepada investor dari Kota Denpasar. Lahan itu diuruk tanah untuk fondasi sepanjang 200 meter. Dipastikan dibangun akomodasi pariwisata hotel dan resort.

Ahli waris dari I Made Mangku (almarhum) I Nyoman Budi Arsana alias Komang Milik, mengatakan tanah orang tuanya itu ada sertifikat kepemilikan aslinya. Dan transaksi jual beli pada investor asal Kota Denpasar dilakukan sejak tiga bulan lalu. "Proses penerbitan sertifikat lewat permohonan. Sertifikatnya terbit 1982. Lokasi reklamasi itu dahulunya sempat menjadi tambak ikan selama puluhan tahun. Karena pengelolaan tidak berhasil maka dihentikan sampai sekarang," ujar Komang Milik Minggu (17/5) lalu.

Dikatakan, investor pembeli tanah miliknya Heri Mustika. Selama proses pengurusan tidak dimungkiri Komang Milik, puluhan pohon bakau rusak tertimbun tanah dan bebatuan pembangunan jalan sepanjang 200 meter, dan juga fondasi sekitar 15 meter. "Sementara ini baru hanya diuruk. Fondasi itu memang ada kaitannya dengan pembangunan pariwisata, detailnya saya belum dikasi tahu. Saya hanya sebagai penjual tanah.

Sekarang ini tanah itu sudah dijual kepada investor seluas dua hektar, kepada perseorangan bernama Heri Mustika dari Denpasar," terangnya.

Disinggung soal perizinan, Komang Milik mengaku sudah melengkapi sesuai prosedur berlaku. Ia ingat lokasi yang direklamasi dahulunya adalah daratan bercampur batu kapur. Akibat terjadinya pasang surut di lokasi Teluk Penerusan itu, ayahnya menanam bakau untuk menghindari abrasi. "Dulunya lokasi ini (reklamasi -red) berisikan karang dan diambil untuk kapur, sehingga terjadi proses pengerukan. Nah kalau penanaman mangrove sendiri, itu langsung dari ayah saya I Made Mangku sendiri," katanya sembari menambahkan memang harga tanahnya di tempat strategis itu relatif murah Rp 15 juta per are.

Camat Gerokgak Putu Ariadi Pribadi, S. STP., M.A.P., mengatakan, tanah yang dijual kepada investor itu merupakan tanah milik sah dari warga Komang Milik. Di sekitar tanah 2 Ha dari

Komang Milik itu diakuinya masih hektaran juga yang statusnya tanah milik perseorangan. "Luas tanah orang tua Komang Milik, mencapai 2 Ha. Kalau luas keseluruhan mencapai 27 Ha (pemilik tanah lainnya-red). Ini hak milik dari salah satu warga kami," katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ketut Ngurah Arya, menegaskan, kerusakan alam mangrove setidaknya harus dihindari masyarakat. Sayangnya tidak semua masyarakat berpikiran senada. Persoalannya masyarakat harus dapat membuktikan tanah yang dimaksud adalah milik pribadi. Bukan tanah di atas kawasan konservasi atau negara. "Kalau itu memang hak miliknya dan masyarakat bisa membuktikannya kan gak ada salah dan juga masalah. Kalau bicara tentang hak milik dan itu sesuai sertifikat, jika membuat tanah itu menjadi bagus, itu kan boleh saja. Sedangkan, jika sudah berisi mangrove, ya ini harus dievaluasi dan ditinjau kembali," tegasnya. (kmb34)

Edisi : Selasa, 10 Mei 2015

Hal : 13



Gedung DPRD Lama Segera Dibongkar

Semarang (Bali Post) -

Gedung DPRD lama yang ada di selatan Pura Jagatnatha Klungkung dipastikan akan segera dibongkar. Pembongkaran akan dilaksanakan bulan depan dengan anggaran Rp 74 juta. Penghancuran gedung tua yang sudah bocor ini dilakukan karena aset tersebut sudah lebih dulu diputihkan dan tidak bisa dilakukan renovasi kembali.

Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta menjelaskan, keberadaan DPRD lama yang ada di selatan Pura Jagatnatha ini harus segera dirobohkan. Gedung tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan karena kondisinya yang sudah rusak. Beberapa ruangnya bocor akibat atap sudah rusak. Di sisi lain, Pemkab Klungkung tidak bisa menganggarkan untuk renovasi karena sudah lebih dulu diputihkan. "Atapnya sudah bocor tidak bisa digunakan lagi. Renovasi tidak bisa karena sudah diputihkan," jelasnya, Senin (18/5) kemarin.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Klungkung Ketut Suayadnya didampingi Kabid Cipta Karya I Gusti Lanang Suratma mengungkapkan pihaknya masih menunggu proses upacara pralina sebelum perobohan bangunan dilakukan. Bangunan DPRD lama ini termasuk gedung tua yang menggunakan arsitektur Belanda. "Kalau umurnya saya tidak tahu, tapi dari beberapa bagian bangunan menggunakan gaya Belanda," ujarnya.

Rencananya bekas lahan DPRD lama tersebut akan dibangun wantilan yang dapat menunjang kegiatan di Pura Jagatnatha. Selanjutnya di sebelah barat akan dibangun kantin sehat yang menyediakan berbagai macam kuliner. Sedangkan di sebelah selatan akan dimanfaatkan untuk parkir Pemkab Klungkung. Saat ini, proses pembongkaran bangunan masih menunggu pemenang pengerjaan. Setelah pembongkaran dilakukan, rencananya material bangunan tersebut akan segera dilelang. (dwa)

Edisi : Selasa, 19 Mei 2015

Hal : 16



Uji Coba "Tapping Box" ✓

Pantau Transaksi Wajib Pajak

Denpasar (Bali Post) -

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Denpasar tengah menyiapkan sistem pemantauan transaksi perpajakan khusus PHR dan Hiburan guna mengamankan target pendapatan daerah. Sistem tersebut saat ini tengah dalam masa uji coba. Kadispenda Kota Denpasar I Dewa Nyoman Semadi mengungkapkan, sistem pemantauan transaksi perpajakan itu salah satunya dengan mengaplikasikan alat perekam transaksi atau *tapping box*. Untuk kepentingan tersebut, pihak Dispenda menjalin kerja sama dengan perbankan yakni BPD Bali.

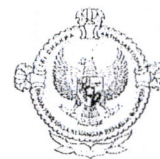
"Kita siapkan alat *tapping box*. Alat itu dipasang di sejumlah wajib pajak. Dengan begitu kita akan tahu transaksi yang dilakukan wajib pajak. Akan ketahuan berapa sebenarnya pajak yang harus dibayarkan," ujarnya. Saat ini jumlah *tapping box* yang dipasang belum banyak. Dikatakan Semadi, baru ada 12 unit *tapping box* yang digunakan di masa uji coba. Setelah diujicobakan, maka tahap selanjutnya berupa evaluasi. Di mana evaluasi penerapan sistem tersebut bakal dilakukan dalam waktu dekat.

Semadi mengatakan, jika terbukti efektif, maka penerapan sistem itu juga bakal diberlakukan untuk wajib pajak lainnya di Kota Denpasar. "Juga akan disiapkan payung hukumnya, apakah itu perda atau perwali," katanya. Lebih lanjut dikatakannya, Denpasar sebagai *smart city* perlu didukung penerapan teknologi informasi di berbagai bidang pemerintahan. Maka dari itu, Dispenda telah membangun teknologi informasi di bidang perpajakan melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tak hanya menyangkut PHR yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah dari sektor pajak, penerapan teknologi informasi juga berlaku untuk pajak lainnya seperti pajak air tanah dan PBB. Meski demikian, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penerapan teknologi informasi perpajakan di Denpasar. Maka dari itu ke depannya, sistem perlu terus disempurnakan. "Sistem diupayakan untuk dikembangkan. Selain itu kita juga terus melakukan langkah-langkah lainnya untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak misalnya dengan terus melakukan validasi data," tambahnya. (kmb25)

Edisi : Selasa, 19 Mei 2015

Hal : 2



Rehab Pasar Banyuasri Rp 40 Miliar Pasar Seririt Digelontor Rp 18,5 Miliar

Singaraja (Bali Post) -
Pasar Banyuasri sebagai pasat terbesar kedua di Kota Singaraja saat ini mulai mendapat program perbaikan dari pemerintah daerah, akibat los maupun kios pasar itu mengalami kerusakan. Perbaikan dilakukan, juga untuk mengatasi persoalan pasar tumpah, yang kini menempati lambung barat Terminal Banyuasri, Singaraja. Tak tanggung-tanggung, Pemkab Buleleng menggelontorkan anggaran perbaikan Rp 40 miliar. Bukan hanya Pasar Banyuasri direhab, Pasar Seririt yang rusak karena terbakar dipastikan mendapat kucuran anggaran hingga Rp 18,5 miliar.

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S.T. didampingi Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Sekkab Buleleng Made Supartawan Senin (18/5) kemarin, mengatakan, perbaikan pasar ini sudah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah yang fokus menangani infrastruktur di perkotaan. Sebagai langkah awal, Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng bersama instansi terkait lainnya, melakukan pendataan aset baik di Pasar Banyuasri maupun di areal pasar tumpah di lambung barat Terminal Banyuasri. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui data akurat aset milik pemerintah daerah, sekaligus kondisi fisik aset tersebut. Pendataan ini sangat penting, karena di kawasan pasar itu sampai saat ini status rumah toko (ruko-red) masih belum jelas.

"Saya minta PD Pasar bersama instansi terkait mendata aset di pasar. Pendataan ini untuk mengetahui mana aset milik kita dan mana aset milik perorangan," katanya.
Selain pendataan aset, lanjut Bupati PAS, pemerintah daerah juga telah merencanakan menyusun dokumen *detail engineering design* (DED-red). Penyusunan dokumen DED ini rencananya mulai digarap pada anggaran APBD Perubahan 2015 ini dan ditargetkan rampung 2016 mendatang. Setelah dokumen ini keluar tahun ini artinya tahun 2016 mendatang, pemerintah sudah memulai pelaksanaan pembangunan Pasar Banyuasri. Direncanakan pasar menjadi lebih representatif dan dapat menyelesaikan persoalan pasar tumpah itu.

Edisi	: Selasa, 19 Mei 2015
Hal	: 3



“Anggaran yang kita siapkan murni kita berikan penyertaan modal. Mengapa Pasar Banyuasri diperbaiki, lantaran sudah tidak representatif los dan kios banyak rusak. Apalagi pasar tumpah itu sangat tidak tertata. Dan solusinya setelah Pasar Banyuasri kita bangun persoalan itu bisa bisa kita tangani,” katanya.

Di sisi lain, Bupati PAS mengatakan, program pembangunan pasar yang kompleks ini memaksa pemerintah daerah tidak main-main dalam menyiapkan dukungan anggaran pembangunan pasar tersebut. Dari perencanaan awal, Pasar Banyuasri tersebut bakal digelontor anggaran Rp 40 miliar. Sementara anggaran ini akan diprogramkan di APBD induk 2016 mendatang. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah berjuang memohon anggaran baik kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali maupun kepada pemerintah pusat. “Ini baru perencanaan, anggarannya kita siapkan Rp 40 miliar dan kami coba mencari bantuan ke provinsi atau ke pusat, sehingga program ini dapat segera diwujudkan dan tidak menjadi sekadar wacana,” tegasnya.

Pasar Seririt

Selain Pasar Banyuasri, pemerintah daerah juga memastikan akan membangun Pasar Seririt. Pasar ini luluh lantak akibat terbakar belum lama ini. Pasar yang berada di kota yang dikenal dengan julukan “Segitiga Emas” ini akan digelontor anggaran sebesar Rp 18,5 miliar. Dari total anggaran yang disiapkan ini Rp 14 miliar merupakan sokongan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Saat ini pemerintah masih menyempurnakan dokumen DED-nya. Hal ini dilakukan karena dokumen yang sudah disusun sebelumnya itu terkesan belum optimal, sehingga disempurnakan kembali. Salah satu penyempurnaan DED itu menyangkut zonasi pedagang yang dibedakan dengan jenis komoditas barang dagangan. Selain itu, menyangkut pembangunan drainase dan penataan lingkungan, sehingga begitu pasar dibangun bisa berfungsi dengan baik. Dan terpenting bagaimana aset pasar ini bisa terhindar dari bahaya kebakaran, seperti dua kali kejadian sebelumnya. **(kmb38)**